

TRANSNASIONAL ISLAM DAN SPEKTRUM LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Oleh: Umar Samsudin

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani, Tangerang

e-mail: umarsam72@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dari masa sebelum penjajahan sampai era reformasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia dari masa ke masa telah memengaruhi masyarakat, sehingga terjadi perubahan-perubahan dalam semua aspek kehidupan mereka. Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan bahwa Islam, budaya, bahasa dan pendidikan telah menembus batas-batas suatu negara. Demikian juga dengan pendidikan Islam telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga penyelenggaraannya telah mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Madrasah, Pesantren, Negara, Budaya dan Agama

Pendahuluan

Pasca 11 September 2001 muncul pandangan-pandangan negatif tentang pesantren, khususnya pandangan Barat. Pesantren di Indonesia digambarkan sebagai lembaga pendorong radikalisme dan militansi kekerasan. Secara umum, lembaga pendidikan Islam dipandang sebagai 'sekolah fundamentalis' dan 'universitas jihad' dan diduga membina pola pikir dan militansi kekerasan abad pertengahan seperti yang mereka contohkan Pondok Pesantren al-Mukmin Ngruki Solo. Pandangan negatif Barat ini tidak hanya diarahkan pada pendidikan Islam di Indonesia saja, tetapi di Barat juga demikian. Misalnya di Jerman, Bassam Tibi menganggap pelembagaan ajaran Islam di sekolah umum Jerman sebagai 'Trojanisches Pferd der radikalen Muslime' (Kuda Trojan Muslim Radikal). Di Inggris, David Bell berkomentar bahwa sekolah-sekolah muslim tidak mengkomunikasikan Inggris sebagai "warisan umum", mereka juga tidak mengajarkan kewarganegaraan.¹

Menyikapi hal ini Barat khususnya Amerika pada akhir Agustus 2004 menyediakan \$ 157.000.000 untuk Indonesia selama 5 tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah-sekolah agama, sehingga

¹ Florian Pohl, "Islamic Education and Civil Society; Reflections on the Pesantren Tradition in Contemporary Indonesia", *Source: Comparative Education Review*, Vol. 50, No. 3, August 2006, h. 389-409.

diharapkan dapat mengekang pertumbuhan radikalisme muslim di seluruh nusantara. Radikalisme dan kekerasan sebagai masalah dan tantangan pesantren telah lama diidentifikasi oleh Barat dan pendidik di Indonesia. Saat merefleksikan potensi sekolah dalam mempersiapkan siswa untuk hidup di masyarakat modern, pendidikan dianggap kurang lancar, kekurangan dana, dan dikelola oleh guru yang berkualitas rendah. Pada umumnya, pesantren dianggap tidak layak untuk menghasilkan jenis lulusan yang mampu memberikan kontribusi kreatif untuk proses modernisasi dan transformasi sosial. Modernisasi, memang dianggap akar masalah yang dihadapi pesantren. Oleh karena itu, lebih lanjut tulisan ini akan membahas seputar hubungan agama, Negara dan pendidikan Islam.

Agama, Negara dan Pendidikan Islam

Agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk mencintai negaranya karena negara atau tanah air merupakan bagian dari agama. Agama Islam misalnya dalam ajarannya dinyatakan bahwa, '*Hubbul wathan minal iiman*' (cinta Tanah Air adalah bagian dari iman) oleh karena itu, negara tidak dapat dipisahkan dari agama seperti juga dapat dilihat dalam pembukaan UUD 45. Begitu eratnya hubungan antara negara dengan agama, maka dalam kurikulum pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan terdapat materi-materi pelajaran yang membahas tentang cinta tanah air yang dikaji melalui filsafat Pancasila dan juga hubungannya dengan agama. Betapa bahayanya ketika suatu negara tidak mengajarkan cinta terhadap agama dan tanah airnya. Maka munculnya pandangan negatif Barat yang diarahkan kepada negara Barat sendiri dan Indonesia karena tidak mengajarkan cinta tanah air dalam lembaga pendidikan. Oleh karena itu pada periode Orde Baru pemerintah menekankan cinta tanah air yang dikembangkan dalam pendidikan Islam dengan kebijakan-kebijakan yang cukup strategis.

Kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai pendidikan Islam dalam konteks madrasah di Indonesia bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam dua dekade terakhir 1980-an sampai dengan 1990-an. Pada pemerintah, lembaga pendidikan di kembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan peningkatan dan peningkatan mutu pendidikan. Pada awal-awal masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan tentang madrasah bersifat melanjutkan dan meningkatkan kebijakan Orde Lama. Pada tahap ini madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi baru bersifat lembaga pendidikan bersifat otonom di bawah pengawasan menteri agama. Menghadapi kenyataan tersebut di atas, langkah pertama dalam melakukan pembaruan ini adalah dikeluarkannya kebijakan tahun 1967 sebagai respons terhadap TAP MPRS No. XXVII tahun 1966 dengan melakukan formalisasi dan strukturisasi madrasah.

Dalam dekade 1970-an madrasah terus dikembangkan untuk memperkuat keberadaannya, namun di awal -awal tahun 1970-an, justru kebijakan pemerintah terkesan berupaya untuk mengisolasi madrasah dari bagian sistem pendidikan nasional. Hal ini terlihat dengan langkah yang di tempuh pemerintah dengan mengeluarkan suatu kebijakan berupa keputusan presiden nomor 34 tanggal 18 April tahun 1972 tentang tanggung jawab fungsional pendidikan dan latihan. Isi keputusan ini mencakup tiga hal: 1. Menteri pendidikan dan kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kebijakan. 2. Menteri tenaga kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan dan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja akan pegawai negeri. 3. Ketua lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri.

Setelah SKB (surat keputusan bersama) tiga menteri, usaha pengembangan madrasah selanjutnya adalah dikeluarkannya SKB tiga menteri P&K no.299/U/19884 dengan menteri agama no 45 th 1984, tentang pengaturan pembakuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah yang isinya antara lain adalah mengizinkan kepada lulusan madrasah untuk melanjutkan ke sekolah-sekolah umum yang lebih tinggi. SKB 2 menteri dijiwai oleh TAP MPR No. II/TAP/MPR/1983 tentang perlunya penyesuaian sistem pendidikan sejalan dengan daya kebutuhan bidang bersama, antara lain dilakukan melalui perbaikan kurikulum sebagai salah satu di antara berbagai upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan madrasah.

Dalam keputusan tersebut terjadi perubahan berupa perbaikan dan penyempurnaan kurikulum sekolah umum dan madrasah. Perubahan tersebut tertuang dalam KMA No. 99 th 1984 untuk tingkat MI, ketentuan KMA no 100 untuk tingkat MTS, dan MA no101 untuk tingkat PGAN. Keempat KMA tersebut merupakan upaya untuk memperbaiki kurikulum madrasah agar lebih efektif dan efisien antara lain dalam hal: 1. Mengorganisasikan program pengajaran. 2. Membentuk manusia memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta keharmonisan sesama manusia dan lingkungannya. 3. Mengefektifkan proses belajar mengajar. 4. Mengoptimalkan waktu belajar.

Upaya dalam pengaturan dan pembaruan kurikulum madrasah dikembangkan dengan menyusun kurikulum sesuai dengan konsesus yang ditetapkan. Khusus untuk MA, waktu untuk setiap mata pelajaran berlangsung 45 menit dan memakai semester. Sementara itu, jenis program pendidikan dalam kurikulum madrasah terdiri dari program inti dan program pilihan.

Pengembangan kedua program kurikulum ini dibagi menjadi dua bagian yaitu: pendidikan agama, terdiri dari : Al-qur'an Hadits, aqidah Akhlak, fikih, SKI, dan Bahasa Arab, dan pendidikan umum antara lain: PMP, PSPB, Bahasa dan sastra indonesia, pengetahuan, sains, olah raga dan kesehatan,

Matematika, Pendidikan seni, pendidikan keterampilan, Bahasa Inggris (MTS dan MA), kimia (MA), Geografi (MA), Biologi (MA), Fisika (MA) dan kimia (MA).

Jenis-jenis pendidikan Islam pada masa Orde Baru adalah sebagai berikut: 1. Pesantren klasik, semacam sekolah swasta keagamaan yang menyediakan asrama, yang sejauh mungkin memberikan pendidikan yang bersifat pribadi, sebelumnya terbatas pada pengajaran keagamaan serta pelaksanaan ibadah. 2. Madrasah diniyah, yaitu sekolah-sekolah yang memberikan pengajaran tambahan bagi murid sekolah negeri yang berusia 7 sampai 20 tahun. 3. Madrasah-madrasah swasta, yaitu pesantren yang dikelola secara modern, yang bersamaan dengan pengajaran agama juga diberikan pelajaran-pelajaran umum. 4. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), yaitu sekolah dasar negeri enam tahun, di mana perbandingan umum kira-kira 1:2. 5. Suatu percobaan baru telah ditambahkan pada madrasah ibtidaiyah negeri (MIN) 6 tahun, dengan menambahkan kursus selama 2 tahun, yang memberikan latihan keterampilan sederhana. 6. Pendidikan teologi agama tertinggi. Pada tingkat universitas diberikan sejak tahun 1960 pada IAIN. IAIN ini dimulai dengan dua bagian/dua fakultas di Yogyakarta dan dua fakultas di Jakarta.

Membangun Indonesia dengan Pendidikan

Dalam membangun Indonesia, maka perlu ide-ide cemerlang sehingga dapat ditemukan konsep-konsep pendidikan yang sesuai dengan jati diri Bangsa Indonesia. Di antara ide-ide itu antara lain: Ide pertama tentang '*Perjalanan Pasti*'. Boleh dibayangkan Indonesia sekarang bukanlah Indonesia dulu. Kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu tidak menunjukkan kesatuan Nusantara. Kerajaan-kerajaan itu hanya berkuasa pada daerahnya sendiri dan membentuk kekuatan. Kerajaan-kerajaan itu membentuk kebudayaan-kebudayaan sendiri, sehingga mengaburkan pengertian Indonesia sejati. Keindonesiaan pada saat itu dibangun atas keindonesiaan dalam adat dan seni. Mereka belum sadar bahwa mereka adalah sebangsa.² Tumbuhnya masyarakat dan kebudayaan Indonesia sejati digerakkan oleh semangat keindonesiaan. Semangat Indonesia itu dibangun atas kesatuan dan keinsyafan dan perasaan yang mendalam. Semangat itu, adalah semangat baru Indonesia yang tidak bertopang pada masa lalu dan apalagi bertopang pada Negara lain. Hal ini bukan berarti semangat Indonesia baru, meniadakan masa lalu. Tentu saja tidak ada masa sekarang tanpa masa lalu.

Kesatuan Indonesia dibangun atas kekuatan-kekuatan sendiri, baik ekonomi, sosial dan kultur. Hal ini bukan berarti menolak sistem Barat. Bagaimanapun juga harus diakui bahwa Barat memiliki sistem yang baik dalam

² Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan* (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1986), h. 28.

memberdayakan alam untuk mempertahankan diri mereka. Dari sinilah lahir paham materialisme, individualisme dan intelektualisme. Paham-paham ini lambat laun akan memengaruhi budaya Indonesia sehingga muncul istilah Barat dan Timur dengan segala kekurangan dan kelebihan masing-masing. Secara perlahan tapi pasti, kekuatan budaya, ekonomi dan sosial melebur menjadi kesatuan Indonesia baru. Indonesia yang berdiri atas budaya, ekonomi dan sosial bangsa sendiri dengan tetap mempertimbangkan budaya-budaya lain di dunia ini. Persoalannya adalah bagaimana Indonesia mampu membangun kebudayaan dalam semua aspek kehidupan melebihi bangsa lain di dunia ini?

Ide kedua, "*Ontology Barat dan Timur*". Istilah barat dan timur bukan sekedar nama petunjuk arah pada mata angin. Namun, lebih dari itu istilah barat mengacu kepada kebudayaan yang tercipta dari negara-negara yang berada di Benua Eropa dan Amerika. Adapun timur merupakan istilah yang mengacu kepada kebudayaan yang tercipta dari negara-negara yang berada di Benua Asia dan Australia. Secara fisik orang-orang Timur pada umumnya memiliki badan yang lebih kecil dibandingkan dengan orang-orang Barat. Adapun secara geografis, khususnya Indonesia, memiliki letak yang sangat strategis dibandingkan negara-negara Barat. Perbedaan-perbedaan itu sedikit banyak akan memengaruhi budaya negara masing-masing baik Barat atau Timur.

Kebudayaan yang tercipta dari Barat sangat berbeda dengan kebudayaan yang tercipta dari Timur. Perbedaan kebudayaan ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan para tokoh Indonesia pra kemerdekaan seperti dr Sutomo, S.T. Alisyahbana, Sanusi Pane, Ki Hajar Dewantara dan lain-lain tentang adopsi budaya intelektualisme, individualisme, egoisme dan materialisme Barat. Perbedaan budaya Barat dan Timur ini memunculkan istilah 'anti Barat'. Munculnya sikap anti ini lebih disebabkan oleh faktor kehati-hatian yang dipengaruhi oleh individu yang terikat oleh adat-istiadat, agama, macam-macam takhayul dan lain-lain. Sehingga tercipta individu-individu yang nerimo, kurang semangat dan kurang mandiri.

Pada sisi yang lain para tokoh menghendaki masyarakat Indonesia memiliki jiwa yang dibangun dengan intelektualisme, individualisme, egoisme dan materialisme. Sehingga tercipta jiwa-jiwa yang mandiri yang mampu menyeimbangkan antara diri keakuan dan intelektualnya sehingga menjadi individu yang dinamis. Salah satu upaya untuk membangun jiwa-jiwa dinamis itu adalah dengan pendidikan.

Pendidikan Barat oleh sebagian tokoh dianggap mampu menyelesaikan persoalan-persoalan hidup terutama dalam menghadapi alam. Selama ini masyarakat Indonesia cenderung melebur dengan alam dan bukannya mencari solusi untuk memanfaatkannya. Namun, dampaknya adalah

masyarakat cenderung materialistis. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara berusaha menawarkan pendidikan pesantren untuk menciptakan pribadi yang baik. Namun, masing-masing memiliki kelemahan, pendidikan Barat pada lembaga tertentu menimbulkan cerai berai. Sedangkan pesantren cenderung membangun jiwa yang tidak dinamis, karena figur sentral kyai.

Indonesia yang merupakan salah satu negara-negara yang berada di bagian Timur memiliki budaya (*cultur*) dan masyarakat (*civilisatie*) yang khas. Beberapa tokoh menyatakan bahwa kultur Indonesia tidak bisa dirubah dengan kultur Barat.³ Namun, *civilisatie* Barat dapat dipindahkan ke dunia Timur. Teknik dan pikiran Barat mampu menyelesaikan segala sesuatu secara sistematis. Sebagai contoh negara Jepang memiliki kultur dan berusaha mempertahankannya dalam kehidupan mereka, namun memiliki pola pikir Barat. Keberhasilan negara Jepang ini tidak lain karena memiliki semboyan atau prinsip yang jelas dan tegas. Indonesia pada dasarnya tidak kalah berhasilnya dengan Jepang. Pada perkembangannya Indonesia dengan filsafat Pancasila dan semboyan Bhineka Tunggal Ika, mampu menjadi negara besar dengan multikulturnya. Namun, gejala politik nasional tidak mampu menstabilkan budaya-budaya daerah, sehingga muncul insiden-insiden kecil bernuansa kedaerahan. Oleh karena itu, kultur Indonesia harus dipertahankan dengan tetap menerima perubahan sesuai dengan zaman. Persoalannya adalah bagaimana masyarakat Indonesia menerima perubahan dengan tetap mempertahankan budaya bangsa?

Ide ketiga, "*Pendidikan adalah Kekuatan*". Salah satu hal yang menjadi perdebatan para tokoh nasional kita adalah kelemahan masyarakat kita pada kecakapan ilmu teknik. Kelemahan dalam pengelolaan sumber daya alam, misalnya banyak dimanfaatkan oleh bangsa Eropa dan Tionghoa. Sebagai negara besar yang ingin cepat berkembang dan bahkan menjadi negara maju, maka kekurangcakapan dan kekuranguletan masyarakat bangsa ini, justru menjadi tumpuan dan fondasi untuk memperbaiki keadaan, sehingga mampu bersaing dengan negara-negara lain di dunia ini.

Upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan semangat bekerja dan dapat berpikir secara sistematis adalah melalui pendidikan. Membangun pendidikan merupakan pekerjaan yang cukup besar karena mencakup pembangunan jiwa dan raga bangsa Indonesia dalam rangka mempersiapkan masyarakat untuk bekerja dan menguasai alam. Pendidikan juga berusaha untuk dapat menciptakan lingkungan sosial dan lapangan kehidupannya.

³ Adi Negoro membedakan antara kultur, zivilisation dan bildung. Ia memaknai kultur sebagai kemajuan adat istiadat, organisasi masyarakat, supaya memperbagus nasib manusia, menimbulkan rasa kemanusiaan, persahabatan antar manusia-manusia dan bangsa-bangsa. Lihat Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan, ...*, h. 104.

Namun, yang terpenting dalam pembangunan pendidikan ini adalah bagaimana pendidikan dapat menciptakan kebudayaan-kebudayaan sebagai penjelmaan jiwa bangsa Indonesia. Seorang Indonesia boleh menjadi guru besar yang ternama, tetapi kalau kedudukannya tidak dapat menjelma menjadi seluruh bangsa di lapangan ilmu pengetahuan, maka arti guru besarnya itu hanya untuk dirinya sendirinya.

Jadi, menumbuhkembangkan jiwa Indonesia melalui pendidikan merupakan hal yang esensi, sehingga masyarakat Indonesia tidak terjebak dengan budaya-budaya yang datang dari Barat. Upaya-upaya para tokoh nasional untuk menerima seratus persen budaya Barat tentu tidak dapat diterima begitu saja. Namun, upaya ini tentu tetap kita hargai, karena sesungguhnya mereka (para tokoh nasional) sangat menghendaki bangsa Indonesia berjalan secara dinamis. Belenggu ketidaksiyafan untuk tidak melakukan perubahan pada diri dan bangsa dengan sedikit ego dan materialistis perlahan-lahan dapat dikurangi. Jiwa-jiwa seperti ini memang harus dibentuk ditengah-tengah masyarakat Indonesia yang terwarisi oleh ajaran Budha. Nampaknya masyarakat Indonesia terlalu lama tidur, sehingga harus bangun dan segera berbenah.

Ide keempat, "*Membangun Peradaban*". Untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju dan disegani oleh negara lain, maka harus dibangun melalui pengembangan diri dengan budaya-budaya Indonesia dan juga dengan menguasai budaya-budaya Barat. Penguasaan budaya Barat ini memiliki arti yang berbeda dengan adopsi budaya Barat. Dengan penguasaan budaya-budaya yang berkembang di Barat, masyarakat Indonesia mampu untuk membenahi kekurangan-kekurangan yang selama ini menjadi kendala untuk mampu bersaing dengan negara-negara Barat. Salah satu yang harus dibenahi adalah; *pertama*, cara berpikir. Keinsyafan untuk merubah cara berpikir masyarakat Indonesia harus segera diwujudkan dengan berusaha menguasai alam. Penguasaan alam dilakukan agar masyarakat Indonesia mampu mengatur dan memanfaatkannya dengan baik. Dalam hal ini intelektualisme Barat menjadi acuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan.

Kedua, cara bersikap. Pengaruh-pengaruh agama dan watak ketimuran turut mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga membentuk budaya kurang berani. Sopan dan menerima merupakan budaya asli Indonesia. Budaya seperti ini merupakan prinsip pertama sebagai dorongan untuk melakukan sikap berani bertindak dengan menyadari resiko yang akan ditanggung. Untuk menciptakan budaya seperti ini harus memahami sikap individualisme yang lahir dari budaya Barat.

Spektrum Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia

1. Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia

Tantangan reformasi pendidikan dan modernisasi yang dihadapi pesantren di Indonesia, sama dengan kesulitan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam di seluruh dunia. Sejak munculnya pemerintahan kolonial di banyak negara muslim, sistem pendidikan adat telah runtuh atau telah terpinggirkan. Warisan kompleks reformasi adat, pemerintahan kolonial, pasca kemerdekaan, nasionalisme dan sosialisme, dan ekspresi yang muncul sebagai kebangkitan baru Islam semakin merumitkan upaya reformasi pendidikan. Kebangkitan lembaga pendidikan Islam di negara-negara seperti Pakistan dan Iran, serta sebagai pertumbuhan sekolah-sekolah muslim di negara-negara Barat, telah dilihat dengan perhatian sebagai langkah kearah eksklusivisme dan intoleransi. Upaya intelektual memodernisasi pendidikan Islam dan untuk membuat model terpadu pendidikan Islam, dianggap tidak layak untuk membantu siswa dalam menghadapi pengetahuan ilmiah, teknologi, dan kemajuan ekonomi yang mencirikan kehidupan modern dan sebaliknya dianggap memberikan apa yang berbahaya mirip dengan induktrinasi. Yang dikhawatirkan adalah pertanyaan tentang bagaimana sistem pendidikan Islam akan bekerja dalam masyarakat yang pluralis dan multikultural?

J. Mark Halstead menunjukkan ada konvergensi pertanyaan dan argumen terhadap pendidikan Islam dengan kritik pendidikan liberal dan pendidikan agama di negara-negara Barat. Di sekolah agama hak-hak anak, misalnya, James Dwyer menawarkan kritik pendidikan paroki di mana ia menyerang sekolah-sekolah agama untuk mengindoktrinasi siswa dan melanggar hak-hak individu pribadi, fisik, dan politik kebebasan, serta kebebasan berpikir dan berekspresi mereka. Satu sisi bisa dibilang efek pendidikan agama adalah sama dan sebangun dengan sejarah yang lebih panjang dari kritik oleh pendidik liberal yang mempertanyakan relevansi dan legitimasi pembelajaran agama dalam sistem sekolah sekuler, demokratis, dan pluralis masyarakat. Sekolah-sekolah agama digambarkan sebagai lembaga yang mengajarkan keyakinan agama tertentu. Melalui pendidikan, mereka berusaha untuk memulai siswa menjadi iman tertentu, bukannya menyediakan mereka dengan kemampuan kritis untuk meneliti keyakinan dan praktek-praktek tradisional. Instruksi mereka dibandingkan dengan indoktrinasi dan dipahami menentang konsep pendidikan berbasis pada otonomi dan kebebasan individu. Kekhawatiran terkait telah mengkritik teori pendidikan agama untuk klaim sempit dan kaku untuk kebenaran. Diduga dogmatisme yang tersirat dalam konsep seperti pendidikan ditandai sebagai penyebab intoleransi terhadap orang-orang dari persuasi yang berbeda, agama atau sebaliknya. Jika seseorang ingin menghindari perangkap dan bahaya pendidikan agama, seorang pendidik liberal seperti Paul Hirst Heywood

menunjukkan, agama harus tetap dalam lingkup pribadi kehidupan individu dan tidak harus "menentukan isu-isu publik" seperti *education*. Sekali lagi, pendidikan agama dipahami sebagai suatu hal yang pada dasarnya pribadi. Kalau orang mengikuti saran pendidik liberal, pendidikan agama akan tetap terpisah dan tanggung jawab pribadi, tidak memiliki tempat dalam pendidikan publik.

Pesantren di Indonesia oleh kalangan Barat lebih sering disebut dengan pendidikan tradisional atau pesantren tradisional. Dalam pendekatan sejarah, pesantren pada masa awal tidak jauh berbeda dengan pendidikan adat yang telah berdiri sebelum Islam. Pada abad 15 Islam mulai menyebar di Pulau Jawa dan dalam catatan sejarah, Belanda dan India masuk pada abad 17, pada saat itu belum banyak pesantren yang ada, tercatat satu pesantren tertua di Tegalsari Jawa Timur pada abad 18. Pada abad ini pesantren berkembang terbatas dengan sistem informal, di mana santri belajar di masjid atau surau-surau. Pada abad 19 pesantren mulai berkembang dengan sistem yang lebih baik dan cenderung terpengaruh oleh ajaran Hindu Budha. Pada abad ke 20 pesantren banyak dipengaruhi oleh pendidikan dari Timur Tengah dengan mengajarkan al-Qu'an, Ilmu Hadits dan fiqh serta amalan-amalan shaleh lainnya seperti berziarah, metode penyembuhan Islam dan lain-lain.⁴

Pada tahun 1912 berdiri organisasi Muhammadiyah dan disusul dengan berdirinya Persis pada tahun 1923. Kedua organisasi ini berpengaruh terhadap ajaran Islam pada umumnya dan khususnya pendidikan Islam, di mana ajaran Islam cenderung lebih ketat. Sementara itu dengan berdirinya NU cukup mewarnai ajaran Islam yang cenderung lebih fleksibel dan lebih dapat mentolerir ajaran-ajaran tradisional. Dalam konteks pendidikan, Muhammadiyah mengkalim lebih modern dari pada NU, sehingga muncul dua model pendidikan Islam, Muhammadiyah dan NU. Untuk menjembatani dua model ini, berdirilah pesantren Gontor yang juga dipengaruhi oleh perkembangan Islam Timur Tengah dan India. Ajaran-ajaran Islam berkembang di pesantren ini, seperti tafsir, hadits dan juga bahasa Arab dan Inggris. Dengan berdirinya Gontor dan pesantren lainnya seperti Persis, dapat memenagruhi pemikiran radikal Islam.

⁴ Claude Guillot, "Le Role Historique des Perdikan Ou "Villages Francs": Le Cas de Tegalsari", *Archipel* 30, 1985, 137-162; J.A. van der Chys, "Bijdragen Tot de Geschiedenis Van Het Inlandsch Onderwijs", *Tijdschrift Voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde* 14, 1864, h. 212-323; The Historical Evidence is Surveyed in: Martin van Bruinessen, "Pesantren and Kitab Kuning: Continuity and Change in a Tradition of Religious Learning", in: W. Marschall (ed.), *Texts from The Islands: Oral and Written Traditions of Indonesia and the Malay World* [Ethnologica Bernensia 4], Berne: The University of Berne Institute of Ethnology, 1994, h. 121-146.

Setelah Indonesia merdeka dan didukung dengan Orde Baru serta adanya perkembangan ekonomi, pesantren cenderung lebih ramping. Ada yang sistemnya tradisional dan ada yang lebih eksklusif, di mana pelaksanaan kurikulum dengan rasio 70% umum dan 30% agama serta pemberian ijazah bagi lulusannya. Sistem ini mirip dengan madrasah yang dikelola oleh pemerintah. Perbedaannya, siswa di pesantren diharuskan menginap, sedangkan madrasah tidak. Dalam perkembangannya pemerintah juga mendirikan perguruan tinggi Islam atau IAIN. Dengan berdirinya IAIN ini, banyak pesantren yang melakukan integrasi dengan sistem madrasah serta pendidikan nasional.

Di tengah-tengah perubahan sistem pendidikan madrasah dan nasional, masih terdapat pesantren yang mempertahankan sistem tradisional (mengajarkan kitab Kuning, tidak berijazah dan diorientasikan untuk tidak menjadi PNS), misalnya pada tahun 1970-1980-an pesantren Pabelan Magelang Jawa Tengah cenderung memberikan keterampilan pertanian dan teknis.⁵ Dalam pandangan sebagian orang Barat (peneliti) yang datang langsung memberikan pandangan statis dan optimis. Misalnya V.S. Naipaul, yang mengunjungi Pabelan pada tahun 1980, dengan nada sindiran bertanya, 'Apa gunanya itu untuk mengajar anak-anak desa untuk menjadi anak-anak desa'.⁶ Tetapi pengunjung seperti Ivan Illich jauh lebih optimis tentang model pesantren sebagai jenis 'alternatif' pendidikan. Banyak aktivis sosial Indonesia percaya bahwa justru ini yang dibutuhkan untuk membawa pembangunan negara yang tulus dan dapat menumbuhkan dan memberdayakan ekonomi masyarakat miskin. Selain itu, model pesantren ini juga mendapat dukungan dari LSM Jogjakarta, gerakan India, percobaan Paulo Freire dan juga Illich sendiri. Model pesantren ini dapat membangkitkan dan menciptakan intelektual muda berlatar belakang pesantren, sehingga sering dijuluki dengan, "Tradisional Progresif". Kebangkitan berpengaruh kepada intelektual lainnya seperti ilmu pengetahuan sosial, filsafat, teologi pembebasan dan Marxisme.⁷

⁵ M. Saleh Widodo, "Pesantren Darul Fallah: Eksperimen Pesantren Pertanian", in: M. D. Rahardjo (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan* (Jakarta: LP3ES, 1974), h. 121-133; M. Habib Chirzin, "Impak dan Pengaruh Kegiatan Pondok Pabelan Sebagai Lembaga Pendidikan Dan Pengembangan Masyarakat Desa", in: (ed.), *Pesantren: Profil Kyai, Ppesantren dan Madrasah* [=Warta-PDIA No.2] (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama R.I, 1981), h. 69-78.

⁶ V.S. Naipaul, *Among the Believers, an Islamic Journey* (New York: Knopf, 1981).

⁷ Djohan Effendi, "Progressive Traditionalists: The Emergence of a New Discourse in Indonesia's Nahdlatul Ulama During the Abdurrahman Wahid Era", *Thesis*, (Deakin University: Department of Religious Studies, 2000); Laode Ida, *Kaum Progresif dan Sekularisme Baru NU* (Jakarta: Erlangga, 2004).

Namun, sejalan dengan perkembangan pendidikan Islam (pesantren), ajaran Islam bergejolak menentang rezim Orde Baru. Sehingga muncul organisasi DDII yang didirikan oleh M. Natsir yang berniat untuk mengubah masyarakat dan negara melalui perubahan menjadi muslim yang lebih baik. Organisasi ini berkembang menjadi partai politik yang berpengaruh terhadap perkembangan pesantren. Ia menganggap pesantren Gontor terlalu liberal dan lebih mendukung pesantren Ulil Albab Bogor, Al-Mukmin Ngruki dan pesantren lainnya yang sejajar. Setelah terbentuk jaringan Hidayatullah di Pesantren Hidayatullah Balikpapan pada tahun 1970 yang memiliki jaringan 150 pesantren, terjalin hubungan yang baik antara pesantren dan pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan dibukanya pesantren oleh menteri Agama H. Mukti Ali dan selanjutnya banyak para pejabat dan tokoh Orde Baru yang hadir di pesantren tersebut.

2. Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia

Pembaruan pendidikan perlu dilakukan karena negara-negara yang menjalankan program modernisasi pada umumnya dipandang masih terbelakang dalam berbagai hal dan sulit untuk bisa memenuhi dan mendukung program modernisasi. Oleh karena itu, pada bagian ini akan disampaikan variabel-variabel yang memengaruhi pembaruan pendidikan menurut para ahli. Menurut Don Adams terdapat lima variabel yang memengaruhi pembaruan pendidikan:

- a. Ideologi-normatif; perubahan orientasi ideologis yang diekspresikan melalui sistem pendidikan untuk memperkuat dan memperluas norma dalam membentuk wawasan peserta didik, sehingga pendidikan dipandang sebagai instrumen pembinaan *nation building*.
- b. Mobilisasi politik; pergeseran orientasi politik menuntut pembaruan pendidikan yakni untuk mempersiapkan peserta didik menjadi pemimpin modern dan inovator.
- c. Mobilisasi ekonomi; untuk mempersiapkan tenaga kerja yang handal menuntut sistem pendidikan dapat mempersiapkan anak didik menjadi SDM yang handal dan unggul yang mampu mengisi berbagai lapangan kerja yang tercipta dalam proses pembangunan.
- d. Mobilisasi sosial; pendidikan diharapkan dapat memberikan akses peserta didik dalam kehidupan sosial.
- e. Mobilisasi kultural; pendidikan diharapkan mampu memelihara stabilitas dan mengembangkan warisan kultural yang kondusif bagi pembaruan.

Untuk merespon lima variabel di atas, Azra melakukan penambahan variabel; 1. Modernisasi administrasi; pendidikan diharapkan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan differensial sosial, teknik dan manajerial. 2. Differensiasi struktural; pendidikan diharapkan mampu

mengantisipasi differensiasi sosial-ekonomi yang terjadi dengan pembentukan lembaga-lembaga pendidikan khusus. 3. Ekspansi kapasitas; lembaga pendidikan diharapkan mampu menampung sebanyak-banyaknya peserta didik sesuai kebutuhan masyarakat.

Dari variabel-variabel di atas, maka dapat menghasilkan perubahan tata nilai dalam kehidupan masyarakat; 1. Perubahan sistem nilai yakni dengan menanamkan nilai-nilai yang merupakan alternatif bagi sistem nilai tradisional. 2. Output politik, yakni sistem pendidikan dapat diukur dengan perkembangan kuantitas dan kekuatan birokrasi sipil-militer, intelektual dan kader-kader administrasi politik lainnya. 3. Output ekonomi, dapat diukur dari tingkat ketersediaan SDM atau tenaga kerja yang terlatih. 4. Output sosial, dapat dilihat dari integrasi dan mobilitas peserta didik ke dalam masyarakat secara keseluruhan. dan 5. Output kultural, tercermin dari upaya-upaya pengembangan kebudayaan ilmiah, rasional dan inovatif, peningkatan peran integratif agama dan pengembangan bahasa pendidikan.

Variabel-variabel di atas merupakan pembandingan dan bahan analisis berdasar teori-teori yang telah ditetapkan terhadap eksistensi pesantren. Berdasarkan teori-teori yang telah disebutkan menunjukkan bahwa eksistensi pesantren disebabkan oleh adanya usaha para pengelola, kondisi sosial masyarakat Jawa dan peran Kyai. Berangkat dari teori ini, eksistensi pesantren tetap survive dan bertahan karena akomodasi pesantren terhadap perubahan tanpa mengorbankan identitasnya, keterkaitan pesantren dengan komunitas lingkungannya dan posisi kharismatik kyai sebagai pemimpin pesantren.

Di tengah kehidupan modern sekarang ini, keberadaan lembaga pendidikan Islam tradisional (pesantren), ibarat bangunan bersejarah, secara esensial memiliki tradisi budaya yang tidak dapat diabaikan begitu saja.⁸ Di kota-kota besar seperti Jakarta, alumni pesantren tradisional merupakan sosok yang sangat dicari. Ia mampu berdiri di depan untuk memimpin acara-acara keagamaan, sumber inspirasi remaja-remaja dan penghubung masyarakat dalam kehidupan individualistis. Alumni pesantren dengan ikhlas telah menyebar ke pelosok-pelosok daerah untuk berda'wah, mengajak masyarakat menuju jalan yang benar. Keberadaannya ibarat tameng yang dibutuhkan untuk mempertahankan ajaran-ajaran Islam yang murni, di tengah-tengah gempuran globalisasi yang melanda dunia. Ibarat pelita yang dibutuhkan dalam kegelapan kehidupan. Oleh karena itu, para pengelola pesantren berusaha keras untuk mempertahankan kekhasan yang dimiliki dengan melakukan

⁸ .المحافظة علي القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلح . Prinsip mempertahankan nilai-nilai lama yang baik dan mentransfer nilai-nilai baru yang lebih baik. Lihat Abdurrahman Mas'ud, *Menuju Paradigma Islam Humanis* (Yogyakarta: Gama Media, 2003), h. 261.

pembaruan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan, sehingga pesantren dapat berkembang sesuai dengan zaman.

Perkembangan pendidikan mempunyai kecenderungan untuk merefleksikan keadaan atau kebutuhan. Hal ini dirasakan juga dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Perkembangan itu mengikuti perkembangan khususnya masyarakat muslim dan lebih luas masyarakat Indonesia. Perubahan dalam masyarakat Indonesia memengaruhi perkembangan penyelenggaraan pendidikannya. Secara umum, arah perubahan pendidikan Islam bergerak dari da'wah atau memelihara nilai-nilai ajaran Islam, kepemenuhan kebutuhan pemerintah dan lembaga-lembaga terkait sampai pada upaya peningkatan mutu akademik.

Perubahan yang terjadi menunjukkan dinamisme lembaga pendidikan Islam di tengah perkembangan masyarakat Indonesia dari masa ke masa. Pada masa penjajahan sampai kemerdekaan, atau lima tahun sampai sepuluh tahun pertama Orde Lama, penyelenggaraan pendidikan Islam terjadi secara alamiah.⁹ Masyarakat tampil menjadi penyuplai murid dan dana, pengelola dan pemakai pendidikan melakukan pengembangan sendiri. Penyelenggaraan pendidikan Islam belum dikaitkan dengan masa depan lulusan ketika hidup di masyarakat.

Pada masa Orde baru sampai sekarang, era reformasi, penyelenggara pendidikan sudah mulai dikaitkan dengan kebutuhan pasar secara terukur. Seiring dengan perkembangan Republik ini, semakin banyak orang tua yang menyadari dan mengusahakan agar pendidikan anak-anaknya dapat merespon tuntutan zaman (pasar). Sementara itu daya dukung alam yang semakin terbatas karena pertumbuhan penduduk yang luar biasa cepatnya, penyelenggara pendidikan memasuki era baru. Yaitu pendidikan dihadapkan pada era industri dan teknologi informasi. Implikasi realitas tersebut memaksa memaksa kepada penyelenggara pendidikan untuk melihat ulang konsep modernisasi pendidikan Islam pada visi, misi dan program.

Dalam perjalanan sejarah, politik dan ekonomi bangsa ini, pesantren telah mengalami pembaruan-pembaruan. Pembaruan ini dimaksudkan untuk mengimbangi sistem pendidikan yang telah ada sebagai warisan Belanda, yakni sekolah umum. Setelah Indonesia merdeka, perhatian pemerintah

⁹ Terma alamiah di sini dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena dominan, karena penyelenggaraan pendidikan Islam sampai saat ini masih merefleksikan hal demikian. Masih banyak mdrasah apalagi pesantren yang penyelenggaraannya secara alamiah, tapi dengan perbaikan-perbaikan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Lihat Kusuma, JM. Muslimin (Ed.), *Paradigma Baru Pendidikan Restropeksi dan Proyeksi Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: PIC UIN. 2008), h. 5.

terhadap agama cukup serius sehingga terbentuklah madrasah.¹⁰ Dengan demikian terdapat tiga lembaga pendidikan di Indonesia, yakni pesantren, madrasah dan sekolah. Dari tiga lembaga pendidikan tersebut, pesantren dianggap tertinggal dibandingkan dengan dua lembaga lainnya dengan alasan belum terlaksana secara teratur. Steenbrink menyatakan bahwa lembaga pendidikan tradisional sudah mulai ditinggalkan siswanya, dengan memperkenalkan lembaga pendidikan yang lebih teratur dan modern. Azyumardi Azra secara tidak langsung sepakat dengan Steenbrink, dengan menyebutkan perubahan tidak hanya di Nusantara saja, akan tetapi terjadi juga di wilayah negara-negara lain seperti Turki dan Mesir. Di Turki terjadi perubahan sistem Madrasah ke sekolah umum¹¹. Adapun di Mesir berusaha mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan sekolah umum.

Lebih lanjut Azyumardi menyatakan bahwa sejak adanya sistem pendidikan modern, tidak banyak lembaga pendidikan tradisional Islam mampu bertahan. Adapun lembaga pendidikan tradisional yang masih mampu bertahan, menurutnya karena faktor kultur Jawa yang involutif dan menekankan harmoni, sehingga mampu menyerap kebudayaan luar tanpa kehilangan identitasnya. Hasan Langgulung dan Geertz sepakat bertahannya lembaga tradisional dikarenakan peran kyai. Bagi Ma'shum ketahanannya karena pesantren mampu melahirkan berbagai daya guna bagi masyarakat. Aya Sofia menduga ketahanannya karena jiwa kewiraswastaannya. Sementara Gus Dur menyebut ketahanannya karena pola kehidupan pesantren yang unik sebagai sub kultur.

Perjalanannya pesantren mengalami pasang surut. Menurut para ahli keberadaan pesantren, terutama pesantren dengan sistem tradisional, cenderung lambat dalam perkembangannya. Steenbrink menyatakan bahwa lembaga pendidikan tradisional sudah mulai ditinggalkan siswanya, dengan memperkenalkan lembaga pendidikan yang lebih teratur dan modern. Azyumardi Azra secara tidak langsung sepakat dengan Steenbrink, dengan menyebutkan perubahan tidak hanya di Nusantara saja, akan tetapi terjadi juga di wilayah negara-negara lain seperti Turki dan Mesir. Di Turki terjadi perubahan sistem madrasah ke sekolah umum. Adapun di Mesir berusaha mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan sekolah umum.

¹⁰ Untuk memberikan kepastian tentang pengajaran agama, maka pada tahun 1946 dikeluarkan Penetapan Bersama antara Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Agama tertanggal 12 Desember 1946 No. 1285/K-7 (Agama) dan 2 Desember 1945 No. 1142/Bhg. A (Pengajaran) yang menetapkan bahwa pendidikan agama hanya dapat diberikan mulai kelas IV SR, sedangkan kelas I, II, III pendidikan agama tidak boleh diberikan.

¹¹ Azyumardi Azra, "Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan", dalam Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: t.p., 1997), h. ix-xi .

Pendapat Geertz ini lebih lanjut dijelaskan oleh Nur Kholis Madjid yang menyatakan bahwa kyai memiliki peran yang otoriter¹² dan sekaligus menjadi model bagi santri dan masyarakat sekitar.¹³ Oleh karena itu, baik peran kyai sebagai otoritas dan model dalam pesantren, sangat berpengaruh terhadap pola pikir santri. Santri dan semua *stake holder* dalam pesantren akan tawadhu', patuh, taat dan tunduk terhadap perintah dan peraturan kyai. Bukan hal berlebihan apabila kemudian kepatuhan dan ketundukan ini dilabelkan pada santri dengan istilah '*sam'an wa tho'atan*' (dengar dan taati)¹⁴

Kesimpulan

Pergantian estafet kepemimpinan dan sistem pemerintahan bangsa Indonesia dari masa pra penjajahan, pacsu penjajahan, Orde baru, Orde Lama sampai reformasi, telah mengalami perubahan-perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, baik tentang hukum, budaya, bahasa dan khususnya pendidikan Islam. Secara umum kaidah-kaidah hukum dan bahasa serapan di Indonesia banyak mengadopsi hukum dan bahasa Arab (Islam). Perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa Islam, budaya, bahasa, pendidikan telah menembus batas-batas suatu negara.

Pada masa pra penjajahan pendidikan diwarnai oleh ajaran-ajaran multi agama dengan arti pendidikan Islam dapat berkembang dengan baik begitu juga dengan agama-agama lainnya. Berbeda dengan pendidikan Islam pada era penjajahan di mana pendidikan Islam mengalami diskrimasi. Pada masa Orde Lama pemerintah lebih menekankan pada pendidikan Pancasila. Pada masa ini pendidikan Islam belum sepenuhnya mendapat tempat. Baru pada masa Orde Baru pendidikan Islam lebih leluasa berkembang. Namun, pendidikan Islam yang diselenggarakan di pesantren baru secara eksplisit disebutkan dalam UU Sisidiknas No. 20 tahun 2003. Dengan demikian pendidikan Islam yang diselenggarakan di madrasah, pesantren atau lembaga lainnya telah mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah.

¹² Zamakhsyari Dhofier menyatakan bahwa kyai merupakan sumber kekuasaan dan kewenangan yang absolut. Lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantrenn, ...*, h. 96.

¹³ Yasmadi, *Modernisasi Pesantren, Kritik Nurkholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 63.

¹⁴ Istilah ini dalam bahasa Jawa diartikan dengan '*sendiko dawuh*' yang biasanya dilakukan oleh prajurit dan rakyat kecil dalam suatu kerajaan. Dalam menyatakan '*sundiko dawuh*' seorang prajurit atau rakyat kecil harus dengan kaki bertumpu pada lutut dan telapak tangan menyatu sambil agak dicium, seperti orang Hindu yang sedang bersembahyang.

Daftar Pustaka

- Azra, Azymardi, *Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan*, dalam Nur Kholis Majid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta, t.p, 1997.
- Chirzin, M. Habib, "Impak dan Pengaruh Kegiatan Pondok Pabelan Sebagai Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat Desa", in: (ed.), *Pesantren: Profil Kyai, Pesantren dan Madrasah* [=Warta-PDIA No.2]. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama R.I., 1981.
- Chys, J.A. van der, "Bijdragen Tot de Geschiedenis Van het Inlandsch Onderwijs", *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde* 14, 1864, 212-323. The historical evidence is surveyed in: Martin van Bruinessen, "Pesantren and Kitab Kuning: Continuity and Change in a Tradition of Religious Learning", in: W. Marschall (ed.), *Texts from the Islands: Oral and Written Traditions of Indonesia and the Malay World* [Ethnologica Bernensia 4], Berne: The University of Berne Institute of Ethnology, 1994.
- Effendi, Djohan, "Progressive traditionalists: the Emergence of a New Discourse in Indonesia's Nahdlatul Ulama During the Abdurrahman Wahid Era", Ph.D. thesis, Deakin University, Department of Religious Studies, 2000; Laode Ida, *Kaum Progresif dan Sekularisme Baru NU*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Guillo, Claude t, "Le role historique des perdikan ou "Villages Francs": Le Cas de Tegalsari", *Archipel* 30, 1985, 137-162.
- Mas'ud, Abdurrahman, *Menuju Paradigma Islam Humanis*. Yogyakarta: Gama Media, 2003.
- Mihardja, Achdiat K., *Polemik Kebudayaan*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1986.
- Muslimin, JM. (Ed.), *Paradigma Baru Pendidikan Restropeksi dan Proyeksi Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta, PIC UIN, 2008.
- Naipaul, V.S., *Among the Believers, an Islamic Journey*. New York: Knopf, 1981.

Pohl, Florian, "Islamic Education and Civil Society; Reflections on the Pesantren Tradition in Contemporary Indonesia", Source: Comparative Education Review, Vol. 50, No. 3, August 2006.

Steenbrink, Kartel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES, 1986.

Widodo, M. Saleh, "*Pesantren Darul Fallah: Eksperimen Pesantren Pertanian*", in: M. D. Rahardjo (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES, 1974,

Yasmadi, *Modernisasi Pesantren, Kritik Nurkholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, Jakarta: Ciputat Press, 2000.